



Evaluation Of The Village Asset Management System (SIPADES) Policy In The Village Government Of Larangan, Candi District

Evaluasi Kebijakan Sistem Pengelolaan Aset Desa (SIPADES) Pada Pemerintah Desa Larangan, Kecamatan Candi

Aisyah Nur Fazri¹⁾, Isna Fitria Agustina^{*,2)}

¹⁾Program Studi Administrasi Publik, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Indonesia

²⁾ Program Studi Administrasi Publik, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Indonesia

*Email Penulis Korespondensi: : isnaagustina@umsida.ac.id

Abstract. *This study aims to evaluate the use of the Village Asset Management System (SIPADES) at the Larangan Village Government, Candi District. This study employed a descriptive qualitative method, with data collected through interviews, observation, and documentation. Data were analyzed using William N. Dunn's policy evaluation theory, which consists of five indicators: effectiveness, efficiency, adequacy, equity, and responsiveness. The results show that the use of SIPADES has not been optimal. In terms of effectiveness, SIPADES has not fully achieved its objectives due to access problems following the update from version 2.0 to version 3.0. In terms of efficiency, these problems have caused asset management processes to be conducted manually, requiring additional time and effort. Adequacy remains suboptimal because digital asset management needs have not been fully met. Equity is constrained by limited training and dependence on a single operator. Responsiveness is also suboptimal due to application access and technical problems.*

Keywords - SIPADES, Village assets, Policy evaluation, Transparenc, Accountability

Abstrak. *Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi penggunaan Sistem Pengelolaan Aset Desa (SIPADES) pada Pemerintah Desa Larangan, Kecamatan Candi. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Analisis data menggunakan teori evaluasi kebijakan William N. Dunn dengan lima indikator, yaitu efektivitas, efisiensi, kecukupan, kesetaraan, dan responsivitas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan SIPADES belum berjalan optimal. Pada indikator efektivitas, SIPADES belum mencapai tujuan secara optimal akibat kendala akses setelah pembaruan versi 2.0 ke versi 3.0. Pada indikator efisiensi, kendala tersebut menyebabkan proses pengelolaan aset dilakukan secara manual sehingga membutuhkan waktu dan tenaga tambahan. Indikator kecukupan belum optimal karena kebutuhan pengelolaan aset secara digital belum sepenuhnya terpenuhi. Indikator kesetaraan terkendala keterbatasan pelatihan dan ketergantungan pada satu operator. Sementara responsivitas belum optimal karena kendala akses dan teknis aplikasi.*

Kata Kunci - SIPADES, Aset desa, Evaluasi kebijakan, Transparansi, Akuntabilitas

I.PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara yang sistem pemerintahannya mulai dari pemerintah pusat hingga pemerintah desa. Sistem pemerintahan di Indonesia menganut pada prinsip desentralisasi, yang menyerahkan kewenangan pengelolaan berbagai urusan pemerintahan kepada pemerintah daerah, termasuk desa. [1] berpendapat bahwa desentralisasi memberikan kesempatan bagi unit terkecil pemerintahan untuk mengelola sumber daya secara efektif sesuai dengan kebutuhan lokal mereka. Oleh karena itu desa memainkan peran penting dalam memelihara, mengelola, dan mengembangkan aset untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Indonesia memiliki landasan kebijakan desentralisasi yang sangat kuat, sebagaimana tertuang jelas dalam Undang-Undang Dasar 1945, di mana daerah dibagi atas daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota. Kabupaten/Kota tersebut kemudian dibagi lagi menjadi kecamatan dan terakhir kecamatan tersebut dibagi lagi menjadi desa atau kelurahan [2]. Pemerintah desa sebagai bagian dari penyelenggaraan pemerintahan memiliki kewenangan dalam mengelola sumber daya yang berada dalam lingkup desa. Salah satu bentuk sumber daya yang perlu dikelola oleh pemerintah desa adalah aset desa. Pengelolaan aset desa mencakup serangkaian proses mulai dari perencanaan, pengadaan, penggunaan, pendayagunaan, perlindungan, pemeliharaan, pemusnahan, pemindahtanganan, pengelolaan, pelaporan, penilaian, pembinaan, pengawasan, hingga pengendalian aset desa [3].

Pengelolaan aset desa menjadi penting karena aset desa merupakan sumber daya yang dapat dimanfaatkan untuk menunjang kegiatan pemerintahan serta kebutuhan sosial dan ekonomi masyarakat desa. Oleh karena itu, pemerintah desa membutuhkan sistem pengelolaan yang dapat membantu proses inventarisasi, pencatatan, dan administrasi aset secara tertib serta dapat dipertanggungjawabkan. Kondisi aset yang dikelola oleh Pemerintah Desa Larangan terdiri atas beberapa jenis aset, sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 1 berikut.

Tabel 1 Data Aset Desa Larangan

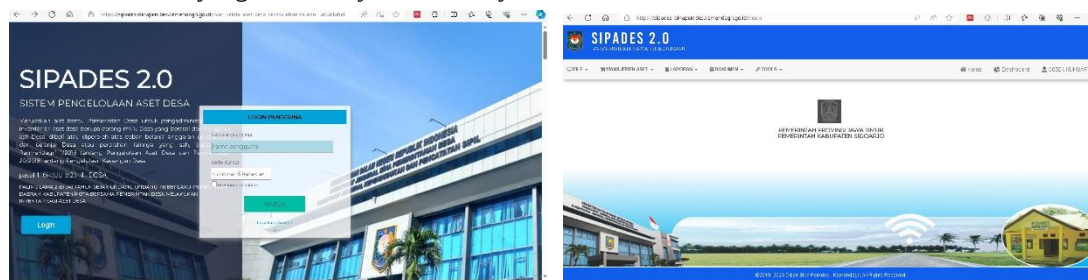
No.	Jenis Aset Desa	Jumlah	Kondisi/Keterangan
1.	Tanah Desa	9 bidang	Baik dan dapat digunakan
2.	Kendaraan	5 unit	Terdiri atas 4 sepeda motor dan 1 mobil APV
3.	Bangunan/Gedung	11 unit	Baik dan dapat digunakan
4.	Jalan/Irigasi	6 unit	Baik dan dapat diakses oleh masyarakat

Sumber : Data Pemerintah Desa Larangan, 2024

Data tersebut menunjukkan bahwa Pemerintah Desa Larangan mengelola berbagai jenis aset dengan karakteristik yang berbeda, mulai dari tanah, kendaraan, bangunan, hingga jalan atau irigasi. Keberagaman aset tersebut membutuhkan proses administrasi dan pencatatan yang teratur agar keberadaan, kondisi, serta pemanfaatannya dapat diketahui dengan jelas. Dengan demikian, pengelolaan aset tidak hanya berkaitan dengan keberadaan fisik aset, tetapi juga berkaitan dengan bagaimana aset tersebut dicatat, didata, dilaporkan, dan dikelola oleh pemerintah desa.

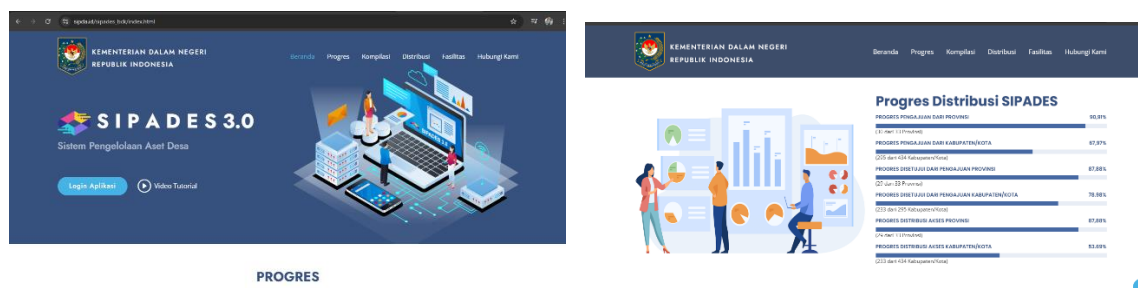
Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri pada tahun 2018 mengembangkan Sistem Pengelolaan Aset Desa (SIPADES) sebagai aplikasi yang digunakan untuk membantu pemerintah desa dalam melakukan pengelolaan dan penatausahaan aset desa. SIPADES merupakan sistem berbasis teknologi informasi yang mendukung proses administrasi aset desa sehingga kegiatan inventarisasi dan pencatatan aset dapat dilakukan secara lebih terstruktur. Kehadiran SIPADES diharapkan dapat membantu pemerintah desa dalam mengelola data aset secara lebih mudah, cepat, tertib, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Penggunaan SIPADES juga sejalan dengan perkembangan *E-Government*, yaitu pemanfaatan teknologi informasi dalam penyelenggaraan pemerintahan. Pemanfaatan teknologi informasi dalam pemerintahan diharapkan dapat mendukung peningkatan efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan. Dalam pengelolaan aset desa, keberadaan SIPADES menjadi salah satu bentuk pemanfaatan teknologi untuk mendukung proses administrasi aset yang sebelumnya masih banyak dilakukan secara manual.



Gambar 1 Tampilan Aplikasi Sistem Pengelolaan Aset Desa (SIPADES), Versi 2.0, Saat Aplikasi SIPADES Masih Bisa Diakses Oleh Pemerintahan Desa Dimana Saja Dengan Memasukkan User Dan Password

Gambar 1 menunjukkan tampilan aplikasi SIPADES versi 2.0 yang digunakan dalam proses pengelolaan aset desa. Tampilan tersebut menjadi gambaran kondisi aplikasi pada versi sebelumnya sebelum dilakukan pembaruan sistem. Keberadaan versi 2.0 menjadi penting dalam penelitian ini karena selanjutnya SIPADES mengalami pembaruan ke versi 3.0.



Gambar 2 Tampilan Aplikasi Sistem Pengelolaan Aset Desa (SIPADES), Versi 3.0, Aplikasi Sudah Tidak Dapat Diakses Sama Sekali Hanya Berupa Homepage Aplikasinya Saja.

Sumber : Pemerintah Desa Larangan, 2025

Gambar 2 menunjukkan tampilan SIPADES setelah dilakukan pembaruan ke versi 3.0. Pembaruan tersebut pada dasarnya ditujukan untuk menyempurnakan sistem pengelolaan aset desa. Namun, pembaruan sistem tidak hanya perlu dilihat dari perubahan tampilan aplikasi, tetapi juga dari kemampuan sistem tersebut dalam mendukung kebutuhan pengelolaan aset di tingkat desa. Oleh karena itu, perubahan dari versi 2.0 menuju versi 3.0 menjadi salah satu konteks penting dalam penelitian ini.

Pengelolaan aset desa ini dilaksanakan berdasarkan asas fungsional, kepastian hukum, transparansi dan keterbukaan, efisiensi, akuntabilitas, dan kepastian nilai [4]. Secara administratif, desa merupakan bentuk pemerintahan kecil yang dipimpin oleh kepala desa melalui pemilihan langsung yang dianggap penting bagi desa. Secara resmi pemerintah telah menerbitkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagai dasar hukum yang mengatur segala sesuatu yang dianggap penting bagi Desa [5]. Harapan pemerintah melalui kementerian Dalam Negeri dalam meluncurkan aplikasi SIPADES dimaksud agar pemerintah desa dapat melakukan inventarisasi aset lebih mudah, cepat, dan tertib dari yang sebelumnya. Sejauh ini memang diakui bahwa pengadministrasian aset desa masih banyak yang dilakukan secara manual, sehingga masih mengalami banyak kesulitan dalam pengelolaan aset desa.

Namun dalam praktiknya, penggunaan aplikasi SIPADES diberbagai daerah masih menemui tantangan. Mulai dari aspek kesiapan sumber daya manusia, ketersediaan infrastruktur teknologi informasi, serta keberfungsian sistem menjadi faktor yang penting yang turut dalam menentukan keberhasilan kineja program tersebut. Seperti yang dikemukakan oleh [6] bahwa dengan adanya pelatihan yang merata dan berkelanjutan akan berpengaruh pada efektivitas penerapan aplikasi SIPADES. Banyak desa masih menggunakan metode manual yang rentan terjadinya kesalahan dan manipulasi data, dan dalam konteks ini terdapat pernyataan dari penelitian sebelumnya yang mendukung pandangan bahwa pengelolaan aset belum ideal karena adanya beberapa faktor yang mempengaruhi seperti faktor personal, struktural, dan kultural serta sumber daya manusia yang belum mumpuni untuk melaksanakan kebijakan Sistem Manajemen Aset Desa (SIPADES) [7].

Permasalahan tersebut juga menjadi relevan dalam konteks penggunaan SIPADES setelah dilakukan pembaruan dari versi 2.0 ke versi 3.0. Pembaruan yang dilakukan untuk menyempurnakan sistem justru diikuti dengan munculnya kendala dalam penggunaan aplikasi di Desa Larangan. Berdasarkan kondisi yang ditemukan peneliti, aplikasi SIPADES versi 3.0 mengalami gangguan sehingga tidak dapat digunakan sebagaimana mestinya. Kondisi tersebut menyebabkan proses administrasi aset desa yang seharusnya dapat dibantu melalui sistem digital kembali menghadapi keterbatasan dan mendorong aparat desa untuk menggunakan pencatatan secara manual. Keadaan tersebut menunjukkan adanya persoalan yang perlu dievaluasi, khususnya terkait kemampuan SIPADES dalam mencapai tujuan pengelolaan aset secara efektif dan efisien.

Kondisi tersebut menjadi dasar penting dalam penelitian ini karena keberhasilan suatu kebijakan atau sistem tidak hanya dapat dilihat dari keberadaan aplikasi, tetapi juga dari sejauh mana aplikasi tersebut mampu memberikan manfaat sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. SIPADES pada dasarnya diharapkan dapat membantu pemerintah desa melakukan inventarisasi dan administrasi aset secara lebih mudah, cepat, dan tertib. Apabila sistem mengalami kendala sehingga penggunaannya tidak dapat berjalan secara optimal, maka perlu dilakukan evaluasi untuk mengetahui sejauh mana tujuan tersebut dapat dicapai serta faktor-faktor yang menjadi hambatan dalam pencapaiannya.

Penelitian ini mengkaji evaluasi kebijakan Sistem Pengelolaan Aset Desa (SIPADES) pasca pembaruan versi 3.0 dengan mengambil studi kasus di Desa Larangan, Kecamatan Candi, Kabupaten Sidoarjo. Penelitian ini memiliki fokus yang berbeda dari penelitian terdahulu karena tidak hanya melihat penerapan SIPADES secara umum, tetapi mengevaluasi kondisi penggunaan SIPADES setelah pembaruan versi 3.0 dibandingkan dengan kondisi pada versi sebelumnya. Evaluasi dilakukan untuk memperoleh gambaran mengenai pencapaian tujuan SIPADES serta berbagai kendala yang muncul dalam penggunaannya di tingkat pemerintah desa.

Dalam penelitian ini mengkaji evaluasi kebijakan Sistem Pengelolaan Aset Desa (SIPADES) pasca update versi 3.0 dengan mengambil studi kasus di Desa Larangan Kecamatan Candi. Dalam penelitian ini membawa perspektif baru dengan menganalisis terkait dengan perkembangan terkini dari sistem yang telah berjalan bertahun-tahun. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu ialah tentang keaslian penelitian ini terletak pada fokus yang berbeda dibandingkan dengan penelitian-penelitian sebelumnya. Penelitian terdahulu yang pertama oleh Maarif, M. S., & Sukmana, H. (2024), dengan judul "*Village Asset Management Innovations Through Application-Based Systems*" menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif dan asosiatif, namun lebih berfokus pada identifikasi hambatan-hambatan dalam penggunaan aplikasi SIPADES seperti kurangnya keterampilan pengurus desa, permasalahan teknis aplikasi, dan minimnya pelatihan [8].

Penelitian yang kedua dilakukan oleh Ediyanto & Indriane, M. (2023) berjudul "*Analisis Penerapan Sistem Pengelolaan Aset Desa (SIPADES) dalam Mewujudkan Good Governance di Desa Tanjungsari Kabupaten Sumedang*" Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif serta teknik pengumpulan pengamatan, *interview*, dan dokumentasi. Penelitian ini menggunakan teori implementasi dari Edward III dengan indikator terdiri dari

komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Temuan studi ini yaitu minimnya kapabilitas aparatur desa disebabkan oleh belum adanya bimbingan teknis (BIMTEK) lanjutan [9]. Berbeda dengan penelitian tersebut, penelitian ini mengambil cakupan yang sama namun berbeda di kinerja SIPADES pasca versi 3.0 dengan versi sebelumnya dan secara spesifik menganalisis dimensi efiseiensi dan indikator aplikasi SIPADES.

Penelitian yang ketiga dilakukan oleh M. R. Q., & Raharso, M. (2020) [10] berjudul “Evaluasi Kesuksesan Implementasi Sistem Pengelolaan Aset Desa (SIPADES)” ditemukan bahwa terdapat beberapa hambatan yang dialami perangkat Desa dalam penggunaan aplikasi SIPADES seperti sistem yang sering error, kurangnya pemahaman perangkat desa dalam penggunaan SIPADES, serta tidak ada pendampingan berkelanjutan jika perangkat Desa menemui kesulitan dalam penggunaan aplikasi. Penelitian yang ke empat dilakukan oleh Wawan (2021) [6] dengan judul “Pengaruh Pelatihan, Kualitas Sumber Daya Manusia Dan Pengetahuan Akuntansi Terhadap Efektivitas Penerapan Aplikasi Sistem Pengelolaan Aset Desa (SIPADES)”. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kuantitatif dengan menggunakan teknik pengumpulan kuesioner dan studi kepustakaan. Penelitian ini menggunakan teori model *unified theory of acceptance and use technology* (UTAUT) dengan menggunakan indikator kemanfaatan (*usefulness*) dan kemudahan pengguna (*easy of use*). Hasil temuan penelitian ini ialah minimnya pelatihan dan variabel kualitas sumber daya manusia berpengaruh terhadap efektivitas penerapan aplikasi SIPADES [6].

Berdasarkan beberapa penelitian terdahulu tersebut, dapat dilihat bahwa penelitian mengenai SIPADES sebelumnya telah membahas berbagai persoalan, seperti kemampuan sumber daya manusia, pelatihan, pendampingan, dan kendala teknis dalam penggunaan aplikasi. Meskipun demikian, penelitian yang secara khusus mengevaluasi kondisi SIPADES setelah pembaruan versi 3.0 dengan menggunakan perspektif evaluasi kebijakan William N. Dunn masih terbatas. Oleh karena itu, penelitian ini menempatkan perubahan kondisi SIPADES dari versi 2.0 ke versi 3.0 sebagai bagian penting dalam melihat pencapaian tujuan kebijakan di tingkat pemerintah desa.

Posisi penelitian ini terletak pada penggunaan teori evaluasi kebijakan William N. Dunn melalui lima indikator, yaitu efektivitas, efisiensi, kecukupan, kesetaraan, dan responsivitas. Kelima indikator tersebut digunakan untuk melihat pencapaian tujuan SIPADES secara lebih menyeluruh, tidak hanya dari aspek keberfungsian aplikasi, tetapi juga dari manfaat yang diberikan, kecukupan dukungan terhadap kebutuhan pengelolaan aset, kesetaraan akses dan dukungan bagi aparatur yang menggunakan sistem, serta responsivitas terhadap kebutuhan dan permasalahan yang muncul. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai hambatan pencapaian tujuan SIPADES versi 3.0 serta memberikan masukan bagi peningkatan pengelolaan aset desa.

Dalam penelitian yang dijelaskan oleh Nur Haliza, S., & Agustina, I. F. (2024) dengan judul “*Quality of Population Administration Services Through Online Service (Plavon) in Realizing E-Government*” menjelaskan bahwa *E-Government* yang dikembangkan dengan tujuan untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publik dalam perkembangan teknologi yang ada [11]. Pemanfaatan teknologi dalam penyelenggaraan pemerintahan tersebut memiliki keterkaitan dengan penggunaan SIPADES sebagai salah satu sistem berbasis teknologi informasi yang digunakan dalam administrasi pengelolaan aset desa. Namun, manfaat teknologi tersebut sangat bergantung pada kemampuan sistem untuk berfungsi dengan baik dan dapat digunakan oleh aparatur sesuai dengan kebutuhan pengelolaan aset.

Berdasarkan hasil observasi awal di Desa Larangan, Kecamatan Candi, ditemukan adanya permasalahan dalam penggunaan SIPADES versi 3.0, terutama berkaitan dengan gangguan sistem yang menyebabkan aplikasi tidak dapat digunakan secara optimal. Kondisi tersebut berdampak pada proses administrasi aset karena aparatur desa perlu menggunakan kembali pencatatan secara manual. Selain itu, keterbatasan pendampingan dan pelatihan juga menjadi kondisi yang perlu diperhatikan dalam penggunaan SIPADES. Temuan awal tersebut belum menjadi kesimpulan mengenai keberhasilan atau kegagalan kebijakan, tetapi menjadi dasar bagi peneliti untuk melakukan evaluasi secara lebih mendalam menggunakan lima indikator evaluasi kebijakan William N. Dunn, yaitu efektivitas, efisiensi, kecukupan, kesetaraan, dan responsivitas.

II.METODE

Pada penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif diskriptif untuk mengevaluasi kinerja kebijakan SIPADES pasca update versi 3.0. Menurut Creswell dalam [12], ini mendefinisikan pendekatan kualitatif sebagai suatu proses dalam penelitian dan pemahaman yang berdasarkan pada metodologi yang menyelidiki suatu fenomena sosial dan masalah manusia. Penelitian ini dilaksanakan di Desa Larangan, Kecamatan Candi, Kabupaten Sidoarjo. Penelitian ini berfokus untuk mengevaluasi kendala pencapaian tujuan kebijakan SIPADES pasca update versi 3.0 yang ternyata dalam pelaksanaannya dilapangan terjadi banyak kendala, mulai dari sistem yang mengalami error sehingga aplikasi tidak dapat diakses.

Data primer yang diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Data sekunder berasal dari dokumen resmi desa, peraturan perundangan, serta literatur yang berkaitan. Data dikumpulkan melalui wawancara

mendalam dengan informan kunci, observasi langsung di lapangan dan dokumentasi. Informan ditentukan dengan teknik purposive sampling, yaitu dengan memilih informan yang benar-benar mengetahui tentang aplikasi SIPADES. Informan utama dari penelitian ini merupakan Ibu Sunikah yang sebagai kaur tata usaha dan umum di Desa Larangan dan 2 perangkat desa yakni, bapak rifky selaku staff umum dan bapak abdul selaku kasi pelayanan yang membantu untuk melakukan pengukuran.

Peneliti menggunakan metode analisis oleh interaktif dari [13] (1994:12) yang meliputi, pertama Pengumpulan Data, pengumpulan data dapat dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Kedua, Reduksi Data, proses yang berupa seleksi data berfokus pada penyederhanaan, abstrak, dan transformasi data mentah dari catatan tertulis untuk digabungkan dengan informasi penting dan membuang informasi yang tidak perlu. Ketiga, Penyajian Data, penyajian data merupakan kombinasi dari beberapa informasi yang didapat di lapangan dalam bentuk data yang akurat dan dapat lebih mudah diakses. Dengan begitu lebih mudah untuk mendapatkan gambaran umum dan dapat memudahkan melakukan penilaian secara keseluruhan. Keempat, Penarikan Kesimpulan, penarikan kesimpulan adalah mengumpulkan semua data berdasarkan bahan hasil peneliti di lapangan.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pemerintah Desa Larangan, Kecamatan Candi, Kabupaten Sidoarjo merupakan salah satu pemerintah desa yang menggunakan Sistem Pengelolaan Aset Desa (SIPADES) sebagai alat bantu dalam pengelolaan dan penatausahaan aset desa. Berdasarkan hasil penelitian, keberadaan SIPADES pada dasarnya memberikan kemudahan bagi aparatur desa dalam melakukan pencatatan dan pengelolaan data aset. Namun, penggunaan SIPADES setelah pembaruan dari versi 2.0 ke versi 3.0 menghadapi kendala teknis yang menyebabkan aplikasi tidak dapat digunakan secara optimal. Kondisi tersebut berdampak pada proses penginputan dan pengelolaan data aset sehingga aparatur desa masih perlu menggunakan pencatatan secara manual.

Data penelitian diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Informan dalam penelitian ini dipilih secara purposive karena memiliki keterlibatan dan pengetahuan mengenai pengelolaan aset serta penggunaan SIPADES di Desa Larangan. Informan utama adalah Ibu Sunikah selaku Kaur Tata Usaha dan Umum yang berperan sebagai operator SIPADES. Selain itu, penelitian melibatkan Bapak Rifky selaku Staff Umum dan Bapak Abdul selaku Kasi Pelayanan yang turut terlibat dalam proses pendataan aset di lapangan, khususnya dalam pengukuran dan pengumpulan data aset sebelum data tersebut digunakan dalam proses administrasi aset. Dengan demikian, informasi yang diperoleh tidak hanya berasal dari sisi operator aplikasi, tetapi juga dari perangkat desa yang terlibat dalam proses pendataan aset secara langsung.

Pelaksanaan Sistem pengelolaan aset desa (SIPADES) ini merupakan langkah yang baik dalam mewujudkan tata kelola digital yang lebih efektif dan efisien. Sejak diterapkannya aplikasi SIPADES ini sangatlah membantu para perangkat desa dalam melakukan penginputan data aset yang ada di desa. Namun pada kenyataannya di lapangan aplikasi sipades ini masih mengalami berbagai kendala dan tantangan baik itu dari luar maupun dari dalam. Mulai dari kendala infrastruktur yang tidak memadai, kurangnya pemahaman dan kapisitas sumber daya manusia (SDM) desa dalam pengoperasian aplikasi. Karena pada dasarnya aplikasi SIPADES ini membantu dalam mengelola aset desa. Pengelolaan aset desa merupakan salah satu aspek penting dalam tata kelola pemerintahan desa yang berorientasi pada transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi.

Sehingga evaluasi pada kebijakan SIPADES ini sangat diperlukan, karena dengan demikian kebijakan Aplikasi SIPADES dapat membantu dalam mewujudkan Good Governance, maka pemerintah harus dapat menyelesaikan masalah-masalah yang muncul dalam penggunaan aplikasi SIPADES [9]. Dengan menggunakan kerangka berpikir William N. Dunn tentang teori evaluasi. Dalam penelitian ini menemukan sejumlah kendala yang berkaitan dengan implementasi SIPADES 3.0 di Desa Larangan, Kecamatan Candi.

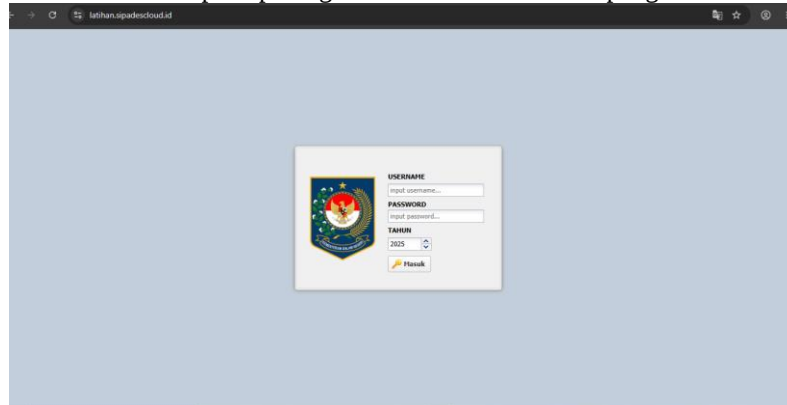
1. Efektivitas

Menurut William N. Dunn, efektivitas berkaitan dengan sejauh mana suatu kebijakan mampu mencapai hasil atau tujuan yang telah ditetapkan. Dengan demikian, efektivitas SIPADES dalam penelitian ini dilihat dari kemampuannya dalam membantu pemerintah desa melakukan pengelolaan dan penatausahaan aset secara lebih mudah, tertib, dan sesuai dengan tujuan penggunaan aplikasi.

Berdasarkan hasil wawancara, sebelum mengalami kendala setelah pembaruan sistem, SIPADES memberikan kemudahan bagi perangkat desa dalam melakukan pencatatan dan pengelolaan aset. Aplikasi tersebut dipandang membantu karena proses pengelolaan aset dapat dilakukan melalui sistem digital. Namun, kondisi tersebut mengalami perubahan setelah SIPADES diperbarui dari versi 2.0 menjadi versi 3.0. Hasil wawancara menunjukkan bahwa setelah pembaruan tersebut aplikasi mengalami kendala akses sehingga operator tidak dapat menggunakan aplikasi sebagaimana mestinya. Ibu Sunikah selaku Kaur Tata Usaha dan Umum sekaligus operator SIPADES menjelaskan:

“Aplikasi tidak dapat dibuka saat tahun 2024 awal, sehingga membuat input data aset desa menjadi terhambat. Apalagi saat terjadi pembaharuan 3.0 yang ini sehingga kita sebagai operator aplikasi tidak dapat melakukan apapun” (wawancara, 20 Agustus 2025).

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa setelah pembaruan ke versi 3.0, SIPADES mengalami kendala akses yang menghambat proses penginputan data aset. Kondisi tersebut dapat dilihat dari tampilan aplikasi yang hanya dapat diakses pada bagian halaman utama tanpa dapat digunakan untuk melakukan pengelolaan data aset.



Gambar 3 Tampilan SIPADES Versi 3.0

Sumber : SIPADES 3.0

Gambar 3 menunjukkan bahwa SIPADES versi 3.0 pada saat penelitian hanya dapat menampilkan halaman utama aplikasi, sedangkan fungsi pengelolaan dan penginputan data belum dapat digunakan. Kondisi tersebut memperlihatkan adanya perubahan kemampuan akses dibandingkan dengan kondisi sebelum pembaruan versi 3.0, ketika SIPADES masih dapat digunakan untuk membantu proses inventarisasi aset. Dengan demikian, kendala pada versi 3.0 secara langsung memengaruhi kemampuan aparatur dalam memanfaatkan SIPADES sebagai sarana pengelolaan aset desa.

“Saat ada SIPADES kita sangat terbantu, dalam pengelolaan aset desa ini. Meskipun tergolong aplikasi yang baru tapi kami sangat enjoy dalam melakukan inventarisasi aset pada saat itu. Ya meskipun pada saat aplikasi bisa diakses harus menunggu intruksi dari pihak DPMD (Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa), karena mereka yang memberikan akses tersebut kepada kami” ” (wawancara, 20 Agustus 2025)

Pernyataan tersebut menunjukkan adanya perubahan kondisi penggunaan SIPADES sebelum dan setelah pembaruan versi. Pada kondisi sebelumnya, aplikasi dapat digunakan sebagai sarana pendataan dan pencatatan aset. Setelah pembaruan versi 3.0, kendala akses menyebabkan fungsi utama aplikasi tidak dapat dimanfaatkan secara optimal. Dengan demikian, permasalahan efektivitas bukan terletak pada tujuan SIPADES, melainkan pada kemampuan sistem dalam menjalankan fungsi tersebut setelah pembaruan.

Kondisi tersebut menjadi penting karena pengelolaan aset desa membutuhkan sistem pencatatan yang dapat digunakan secara berkelanjutan. Ketika aplikasi tidak dapat diakses, proses input data menjadi terhambat dan aparatur desa harus mempertahankan pencatatan secara manual. Keadaan tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara tujuan penggunaan SIPADES dengan kondisi yang terjadi di lapangan. SIPADES dirancang untuk membantu mempermudah pengelolaan aset, tetapi pada kondisi pasca-update versi 3.0 fungsi tersebut belum dapat berjalan secara optimal.

Temuan ini memiliki kesesuaian dengan penelitian M. R. Q. & Raharso (2020) yang menemukan bahwa salah satu hambatan dalam penggunaan SIPADES adalah sistem yang sering mengalami *error*. Temuan tersebut juga sejalan dengan penelitian Maarif dan Sukmana (2024) yang menunjukkan bahwa kendala teknis aplikasi menjadi salah satu faktor yang menghambat penggunaan SIPADES secara optimal. Dengan demikian, permasalahan teknis yang ditemukan di Desa Larangan bukan merupakan persoalan yang berdiri sendiri, tetapi memiliki kesamaan dengan temuan penelitian sebelumnya.

Berdasarkan penjelasan tersebut, indikator efektivitas SIPADES di Desa Larangan dapat dinyatakan belum berhasil secara optimal. SIPADES telah memberikan manfaat ketika dapat digunakan, tetapi setelah pembaruan versi 3.0 terdapat kendala akses yang menyebabkan tujuan utama aplikasi dalam mempermudah pengelolaan aset belum dapat dicapai secara konsisten.

2. Efisiensi

Menurut William N. Dunn, efisiensi berkaitan dengan hubungan antara hasil yang diperoleh dengan sumber daya yang digunakan untuk mencapai hasil tersebut. Dalam konteks penelitian ini, efisiensi SIPADES dilihat dari

sejauh mana aplikasi dapat membantu menghemat waktu, tenaga, dan biaya dalam proses pengelolaan aset desa dibandingkan dengan pencatatan secara manual.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa SIPADES pada dasarnya memberikan manfaat dari sisi efisiensi karena proses pencatatan aset dapat dilakukan secara digital. Namun, manfaat tersebut belum dapat dirasakan secara optimal karena proses pendataan aset di lapangan tetap membutuhkan tahapan manual. Tahapan tersebut pada dasarnya diperlukan untuk memastikan bahwa data yang dimasukkan ke dalam sistem sesuai dengan kondisi aset yang sebenarnya.

Dalam proses pendataan, perangkat desa terlebih dahulu melakukan pengumpulan dan validasi data di lapangan, termasuk pengukuran aset. Setelah data tersebut diperoleh, operator kemudian melakukan proses input ke dalam SIPADES. Salah satu bentuk aset yang perlu didata dan dicatat oleh Pemerintah Desa Larangan adalah aset berupa jalan dan irigasi. Data aset tersebut memuat informasi mengenai nama aset, ukuran, tahun perolehan, nilai, serta keterangan aset. Data tersebut menunjukkan jenis informasi yang perlu disiapkan dalam proses administrasi aset desa sebelum dilakukan penginputan ke dalam sistem SIPADES. Adapun daftar aset desa berupa jalan dan irigasi dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2 Daftar Aset Desa Larangan Berupa Jalan Irigasi

No	Nama barang	Kode barang	NUP	Ukuran (M2)	Tahun perolehan	Nilai (Rp)	Keterangan
1.	Jl. Merpati	-	-	269 M ²	-	-	Jl. Merpati
2.	Jl. Kepodang	-	-	273 M ²	-	-	Jl. Kepodang
3.	Jl. Kutilang	-	-	391 M ²	-	-	Jl. Kutilang
4.	Jl. Cendrawasi	-	-	86 M ²	2023	Rp. 29.700.000	Jl. Desa
5.	Jl. Musholah Al-Amanah	-	-	100 M ²	2023	Rp. 15.256.000	Jl. Desa
6.	Gg. Muria	-	-	88 M ²	-	-	Jl. Cendarawasi rt 05 rw 02

Sumber : Keputusan Kepala Desa Larangan, Nomor 87 Tahun 2024

Tabel 2 menunjukkan bahwa pendataan aset jalan dan irigasi mencakup beberapa informasi yang perlu dicatat dalam administrasi aset desa, seperti nama aset, ukuran, tahun perolehan, nilai, dan keterangan. Kelengkapan informasi tersebut menunjukkan bahwa proses pengelolaan aset membutuhkan tahapan pendataan dan validasi sebelum data dapat dimasukkan ke dalam SIPADES. Dalam kondisi aplikasi dapat digunakan, data yang telah disiapkan tersebut selanjutnya dapat dikelola melalui sistem. Namun, ketika akses SIPADES mengalami kendala, proses administrasi terhadap data aset tetap harus dipersiapkan dan dicatat secara manual. Salah satu informan menjelaskan kondisi tersebut sebagai berikut:

“Aplikasi SIPADES ini sangat menguntungkan sekali, namun sayangnya dalam pengoperasiannya masih harus menunggu adanya konfirmasi dari pusat untuk dapat mengakesenya. Input data jadi terkendala, apalagi kalau kita masih belum melakukan pengukuran pada tanah, green house yang sedang kami kembangkan jadinya memerlukan 2 kali tahapan dalam melakukan rekap data untuk selanjutnya akan kami unggah dalam aplikasi SIPADES” (wawancara, 20 Agustus 2025).

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa proses manual tidak dapat langsung dikategorikan sebagai pemborosan atau pekerjaan yang sia-sia. Pengukuran dan validasi di lapangan memang diperlukan agar data aset yang dimasukkan ke dalam sistem sesuai dengan kondisi sebenarnya. Persoalan efisiensi muncul ketika keterbatasan akses SIPADES menyebabkan data yang telah disiapkan tidak dapat segera dimasukkan ke dalam aplikasi. Akibatnya, aparat harus melakukan rekapitulasi dan menunggu kesempatan ketika sistem dapat digunakan.

Kondisi tersebut semakin terlihat dari pengalaman perangkat desa ketika aplikasi sebelumnya masih dapat diakses tetapi penggunaan sistem tidak selalu berlangsung secara lancar. Ibu Sunikah menjelaskan:

“Dulu saat aplikasi masih bisa kami akses, kami siap untuk lembur jika ada himbauan bahwa aplikasi bisa dibuka. Terus waktu itu kami mau ada monev (monitoring dan evaluasi) dari BKD, saat membuka aplikasinya data yang sudah kami input dalam aplikasi SIPADES sudah hilang semua dan sampai sekarang tidak bisa menginput data apapun karena sistemnya ngga bisa dibuka sama sekali” (wawancara, 20 Agustus 2025).

Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa kendala efisiensi tidak hanya berkaitan dengan adanya pencatatan manual, tetapi juga berkaitan dengan waktu tunggu, kebutuhan melakukan rekapitulasi, dan risiko pekerjaan yang telah dilakukan tidak dapat dimanfaatkan ketika data dalam aplikasi mengalami masalah. Dalam kondisi tersebut, manfaat penggunaan teknologi menjadi berkurang karena aparat tetap harus mempertahankan pencatatan manual sebagai dasar dan cadangan data.

Temuan ini sejalan dengan penelitian Maarif dan Sukmana (2024) yang menunjukkan bahwa hambatan teknis dalam penggunaan SIPADES dapat menyebabkan proses pengelolaan aset tidak berjalan secara optimal dari sisi efisiensi. Namun, terdapat perbedaan konteks dalam penelitian ini. Penelitian di Desa Larangan menunjukkan bahwa proses manual tetap memiliki fungsi penting sebagai validasi data, sedangkan masalah efisiensi muncul ketika sistem digital yang seharusnya membantu proses administrasi tidak dapat digunakan secara konsisten. Berdasarkan uraian tersebut, indikator efisiensi SIPADES di Desa Larangan dapat dinyatakan belum berhasil secara optimal. SIPADES memiliki potensi untuk meningkatkan efisiensi, tetapi kendala akses setelah pembaruan versi 3.0 menyebabkan aparatur masih bergantung pada proses manual dan harus mengeluarkan waktu serta tenaga tambahan untuk memastikan data aset tetap tersedia dan dapat digunakan.

3. Kecukupan

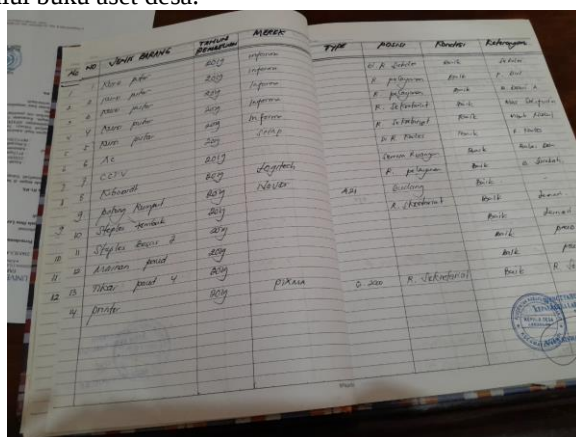
Menurut William N. Dunn, kecukupan berkaitan dengan sejauh mana suatu kebijakan mampu memenuhi kebutuhan atau menyelesaikan masalah yang hendak diatasi. Dalam penelitian ini, kecukupan SIPADES dilihat dari kemampuan aplikasi dalam memenuhi kebutuhan pemerintah desa dalam melakukan pencatatan, inventarisasi, dan pengelolaan aset secara tertib serta memberikan dukungan yang memadai kepada aparatur yang menggunakannya.

Secara konseptual, SIPADES telah dirancang untuk membantu pemerintah desa dalam mengelola aset secara lebih terstruktur. Namun, hasil penelitian menunjukkan bahwa kemampuan tersebut belum sepenuhnya dapat dirasakan oleh Pemerintah Desa Larangan karena aplikasi mengalami kendala akses. Ketika aplikasi tidak dapat digunakan, proses penginputan data aset kembali dilakukan secara manual dengan menggunakan buku pencatatan. Hal tersebut diperkuat oleh pernyataan informan:

“Ya gimana, aplikasi ngga dapat kami akses untuk saat ini jadinya ya otomatis dan harus kami lakukan secara manual dengan menulisnya dibuka. Padahal aplikasi SIPADES ini sangat menguntungkan sekali sebetulnya, namun sayangnya aplikasinya sekarang hanya sebuah pajangan saja karena tidak dapat kami akses dengan baik” (wawancara, 20 Agustus 2025).

Pernyataan tersebut memperlihatkan adanya perbedaan antara kebutuhan pemerintah desa dan kondisi sistem yang tersedia. Pemerintah Desa Larangan membutuhkan sistem yang dapat digunakan untuk mendukung pencatatan dan penyimpanan data aset, sedangkan SIPADES pada kondisi penelitian belum dapat digunakan secara optimal. Oleh karena itu, pencatatan manual tetap dipertahankan sebagai alternatif agar administrasi aset tetap berjalan.

Ketidakmampuan SIPADES untuk diakses menyebabkan Pemerintah Desa Larangan tetap membutuhkan media alternatif untuk menjaga keberlangsungan administrasi aset. Salah satu alternatif yang digunakan adalah pencatatan secara manual melalui buku aset desa.



Gambar 4 Buku Aset Desa Larangan, 2019

Gambar 4 menunjukkan bahwa pencatatan aset desa masih dilakukan secara manual melalui buku aset. Pencatatan tersebut menjadi alternatif bagi pemerintah desa untuk memastikan data aset tetap terdokumentasi meskipun SIPADES tidak dapat digunakan. Kondisi ini menunjukkan bahwa kebutuhan pemerintah desa terhadap media pencatatan aset tetap harus dipenuhi melalui cara lain ketika sistem digital mengalami kendala. Dengan demikian, keberadaan pencatatan manual menunjukkan adanya kesenjangan antara kebutuhan pemerintah desa terhadap sistem pengelolaan aset yang dapat digunakan secara digital dengan kondisi SIPADES pada saat penelitian.

Selain persoalan teknis, kecukupan juga berkaitan dengan dukungan terhadap aparatur sebagai pengguna sistem. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelatihan mengenai SIPADES yang diberikan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) baru dilakukan sekitar dua atau tiga kali dan belum terdapat pelatihan lanjutan yang secara khusus mendukung penggunaan SIPADES versi 3.0. Kondisi tersebut disampaikan oleh Ibu Sunikah:

“Pelatihan untuk aplikasi ini hanya dilakukan 2 atau 3 kali yang dilakukan oleh pihak Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD). Dan kami masih menunggu adanya pelatihan lanjutan lagi, terutama untuk SIPADES yang 3.0 ini.” (Wawancara, 20 Agustus 2025).

Keterbatasan pelatihan lanjutan menjadi persoalan karena perubahan sistem dapat menimbulkan kebutuhan penyesuaian bagi pengguna. Ketika sistem mengalami pembaruan sekaligus menghadapi kendala teknis, aparatur membutuhkan dukungan yang dapat membantu mereka memahami perubahan dan menyelesaikan masalah yang muncul. Dengan demikian, kecukupan SIPADES tidak hanya ditentukan oleh keberadaan aplikasi, tetapi juga oleh dukungan teknis dan peningkatan kapasitas pengguna. Temuan tersebut sejalan dengan penelitian Ediyanto dan Indriane (2023) yang menunjukkan pentingnya bimbingan teknis lanjutan dalam mendukung kemampuan aparatur desa menggunakan SIPADES. Temuan penelitian ini juga sejalan dengan penelitian Wawan (2021) yang menunjukkan bahwa pelatihan dan kualitas sumber daya manusia memiliki hubungan dengan efektivitas penerapan SIPADES.

Berdasarkan penjelasan tersebut, indikator kecukupan SIPADES di Desa Larangan dapat dinyatakan belum berhasil secara optimal. SIPADES secara konsep telah menjawab kebutuhan pengelolaan aset, tetapi dalam praktiknya belum cukup memenuhi kebutuhan pemerintah desa karena aplikasi tidak dapat digunakan secara optimal dan dukungan pelatihan lanjutan masih terbatas.

4. Kesetaraan

Menurut William N. Dunn, kesetaraan berkaitan dengan distribusi manfaat dan beban kebijakan secara adil kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Dalam konteks penelitian ini, kesetaraan tidak hanya dilihat dari apakah SIPADES tersedia bagi seluruh perangkat desa, tetapi juga dari apakah perangkat desa memiliki kesempatan dan kemampuan yang relatif memadai untuk memperoleh manfaat dari penggunaan aplikasi tersebut.

Secara teknis, SIPADES merupakan aplikasi yang dapat digunakan dalam pengelolaan aset desa. Namun, hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam praktiknya pengoperasian aplikasi di Desa Larangan masih terpusat pada satu operator utama, yaitu Ibu Sunikah selaku Kaur Tata Usaha dan Umum. Kondisi tersebut berkaitan dengan pembagian tugas dan kemampuan aparatur dalam mengoperasikan aplikasi. Keterbatasan tersebut semakin terlihat dari pelatihan yang hanya dilakukan dua atau tiga kali dan belum dilanjutkan dengan pelatihan khusus mengenai versi 3.0. Ibu Sunikah menyampaikan bahwa pihak desa masih menunggu pelatihan lanjutan dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD).

“Pelatihan untuk aplikasi ini hanya dilakukan 2 atau 3 kali yang dilakukan oleh pihak Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD). Kami juga menginginkan agar semua perangkat desa mendapatkan pelatihan pada aplikasi SIPADES ini. Karena jika saya tidak ada maka input data tidak dapat dilakukan, atau bahkan saya sampai lembur hanya untuk melakukan penginputan data tersebut.” (wawancara, 20 Agustus 2025).

Pemerintah Desa Larangan sebelumnya telah memperoleh sosialisasi dan pelatihan terkait penggunaan SIPADES yang diselenggarakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Kegiatan tersebut menjadi salah satu bentuk dukungan dalam meningkatkan kemampuan aparatur dalam menggunakan aplikasi.



Gambar 5 Kegiatan Sosialisasi Dan Pelatihan Yang di Selenggarakan Oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kabupaten Sidoarjo

Sumber: Pemerintah Desa Larangan, 2024

Gambar 5 menunjukkan bahwa telah dilakukan kegiatan sosialisasi dan pelatihan SIPADES sebagai bentuk dukungan kepada aparatur desa. Namun, keberadaan pelatihan tersebut belum sepenuhnya menjamin pemerataan kemampuan aparatur dalam menggunakan SIPADES. Berdasarkan hasil wawancara, pelatihan yang diberikan baru dilakukan sekitar dua atau tiga kali dan belum terdapat pelatihan lanjutan khusus untuk SIPADES versi 3.0. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa persoalan kesetaraan dalam penelitian ini bukan terletak pada tidak adanya pelatihan,

tetapi pada keterbatasan frekuensi dan keberlanjutan pelatihan serta belum meratanya kemampuan aparatur dalam menggunakan sistem.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa manfaat SIPADES belum tersebar secara merata pada seluruh perangkat desa. Ketika hanya satu operator yang memiliki tanggung jawab utama terhadap pengoperasian aplikasi, pengetahuan dan kemampuan mengenai SIPADES menjadi terkonsentrasi pada individu tertentu. Apabila operator mengalami kesulitan atau tidak dapat menggunakan sistem, maka proses pengelolaan melalui aplikasi juga berpotensi mengalami hambatan. Namun demikian, kondisi tersebut perlu dibedakan antara pembagian tugas operator dengan ketidaksetaraan kapasitas. Penunjukan satu operator tidak secara otomatis menunjukkan bahwa kebijakan tidak setara, karena pembagian tugas merupakan bagian dari organisasi kerja pemerintah desa. Persoalan kesetaraan dalam penelitian ini lebih terlihat pada terbatasnya pelatihan dan belum meratanya kapasitas penggunaan aplikasi di antara perangkat desa.

Temuan ini sejalan dengan penelitian Ediyanto dan Indriane (2023) yang menekankan pentingnya bimbingan teknis dan peningkatan kapasitas aparatur dalam penerapan SIPADES. Hal tersebut memperlihatkan bahwa dukungan terhadap kemampuan pengguna merupakan bagian penting agar manfaat sistem tidak hanya bergantung pada satu atau beberapa aparatur tertentu. Berdasarkan indikator kesetaraan SIPADES di Desa Larangan dapat dinyatakan belum berhasil secara optimal, terutama dalam aspek pemerataan kapasitas dan dukungan pelatihan bagi perangkat desa. SIPADES telah memberikan manfaat kepada operator yang menggunakannya, tetapi dukungan untuk memastikan kemampuan penggunaan yang lebih merata masih terbatas.

5. Responsivitas

Menurut William N. Dunn, responsivitas berkaitan dengan sejauh mana suatu kebijakan mampu merespons kebutuhan, tuntutan, dan permasalahan yang dihadapi oleh kelompok sasaran. Dalam penelitian ini, responsivitas SIPADES dilihat dari kemampuan sistem dan pihak yang mendukungnya dalam merespons kebutuhan pemerintah desa terhadap pengelolaan, pencatatan, dan pelaporan aset secara cepat dan sesuai kebutuhan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa SIPADES pada dasarnya dibutuhkan oleh Pemerintah Desa Larangan sebagai sarana untuk menyimpan dan mengelola data aset secara digital. Dalam proses pendataan, perangkat desa melakukan pencatatan kondisi aset di lapangan, termasuk pengukuran luas dan lokasi aset, kemudian data tersebut digunakan oleh operator untuk proses administrasi dalam SIPADES. Dengan demikian, sistem memiliki fungsi penting sebagai bagian dari rangkaian proses pengelolaan aset desa.

Tabel 3 Daftar Aset Desa Larangan Berupa Bangunan Gedung

No	Nama Bangunan	Kode Barang	Jumlah Lantai	Luas Bangunan	Tahun Perolehan	Keterangan	Kondisi
1.	Balai Desa	-	1	0,23ha	1976	Jl. Raya Larangan No.4	BAIK
2.	TK	-	1	-		Jl. Raya Larangan	BAIK
3.	Paud Anggrek	-	1	-	2016	Balai Desa Larangan	BAIK
4.	Gedung Poldes	-	1	-	2015	Balai Desa Larangan	BAIK
5.	Gedung Garasi & Parkiran	-	1	-	2022	Balai Desa Larangan	BAIK
6.	Gedung Perpustakaan, Kantor, PKK, Gudang	-	1 & 4 Ruang	-	2014	Balai Desa Larangan	BAIK
7.	Green House	-	-	-	2022	RW 08 Mega Asri	BAIK
8.	Bangunan Saluran Air	-	-	-	2023	RT 01/ RW 01	BAIK
9.	Bangunan Septictank Komunal	-	11 Titik	-	2023	RW 02, 6 TITIK RW 04, 5 TITIK	BAIK
10.	Bangunan Septictank Komunal	-	4 Titik	-	2024	RT 01, 3 TITIK RT 10, 1 TITIK	BAIK
11.	Gedung/Rehab Baldes	-	-	-	2024	Balai Desa	BAIK

Sumber : Keputusan Kepala Desa Larangan, Nomor 87 Tahun 2024

Dari tabel diatas menunjukkan bahwa bangunan atau gedung merupakan aset desa yang dimiliki dan dilakukannya perawatan oleh pemerintah Desa Larangan. Data tersebut merupakan data yang biasanya di unggah di aplikasi SIPADES, namun yang perlu diperhatikan saat melakukan input data ialah dengan melihat seberapa besar ukuran file tersebut. Karena jika terlalu besar ukuran file maka tidak dapat di unggah, sehingga mengharuskan operator melakukan kompresi file terlebih dahulu.

Selain itu, keterbatasan waktu akses sistem menyebabkan perangkat desa harus menyesuaikan waktu kerja dengan kondisi ketersediaan aplikasi. Bahkan, terdapat kondisi ketika operator harus siap bekerja di luar jam kerja ketika terdapat pemberitahuan bahwa aplikasi dapat diakses. Hal ini menunjukkan bahwa sistem belum mampu memberikan akses yang fleksibel sesuai dengan kebutuhan pengguna.

Persoalan responsivitas juga terlihat dari kebutuhan perangkat desa terhadap kepastian waktu akses aplikasi. Ketika penggunaan aplikasi bergantung pada waktu tertentu atau konfirmasi tertentu, perangkat desa harus menyesuaikan waktu kerja dengan ketersediaan sistem. Kondisi tersebut dapat menghambat respons pemerintah desa terhadap kebutuhan administrasi aset, terutama ketika data dibutuhkan dalam waktu tertentu.

Meskipun demikian, responsivitas tidak hanya dapat dilihat dari sisi kelemahan sistem. Hasil wawancara menunjukkan bahwa perangkat desa memiliki harapan agar SIPADES dapat kembali digunakan sehingga data aset yang telah dikumpulkan secara manual dapat memiliki cadangan dalam sistem digital. Ibu Sunikah menyampaikan:

“Ya harapan kami untuk SIPADES ini dapat digunakan kembali agar kami juga mempunyai backup data yang sesuai dengan kondisi lapangan. Ya meskipun harus kerja dua kali dengan metode manual dan harus meninputnya lagi di aplikasi.” (wawancara, 20 Agustus 2025).

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa aparatur desa masih melihat SIPADES sebagai sistem yang dibutuhkan. Persoalannya bukan terletak pada tidak adanya kebutuhan terhadap aplikasi, tetapi pada belum optimalnya kemampuan sistem dalam merespons kebutuhan tersebut. Aparatur bahkan bersedia melakukan pencatatan manual dan menginput kembali data ke aplikasi apabila SIPADES dapat digunakan secara normal. Hal ini menunjukkan adanya kebutuhan nyata terhadap sistem digital sebagai tempat penyimpanan dan pengelolaan data aset.

Berdasarkan penjelasan diatas, indikator responsivitas SIPADES di Desa Larangan dapat dinyatakan belum berhasil secara optimal. Sistem belum mampu memberikan respons secara cepat dan konsisten terhadap kebutuhan aparatur karena keterbatasan akses dan kendala teknis. Namun, kebutuhan dan penerimaan aparatur terhadap keberadaan SIPADES masih tergolong tinggi karena mereka tetap mengharapkan aplikasi dapat digunakan kembali sebagai sarana pengelolaan dan *backup* data aset.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian mengenai evaluasi penggunaan Sistem Pengelolaan Aset Desa (SIPADES) pada Pemerintah Desa Larangan, Kecamatan Candi, menggunakan teori evaluasi kebijakan William N. Dunn, dapat disimpulkan bahwa penggunaan SIPADES belum berjalan secara optimal. Pada indikator efektivitas, SIPADES belum mencapai tujuan secara optimal karena setelah pembaruan versi 2.0 ke versi 3.0 terjadi kendala akses aplikasi. Pada indikator efisiensi, kendala tersebut menyebabkan proses pengelolaan aset dilakukan secara manual sehingga membutuhkan tambahan waktu dan tenaga. Pada indikator kecukupan, SIPADES belum sepenuhnya memenuhi kebutuhan pemerintah desa karena pengelolaan aset masih harus dilakukan secara manual. Pada indikator kesetaraan, pemanfaatan SIPADES belum optimal karena pelatihan masih terbatas dan pengoperasian lebih banyak bergantung pada satu operator. Sementara pada indikator responsivitas, SIPADES belum sepenuhnya mampu merespons kebutuhan pengguna karena masih terdapat kendala akses dan teknis aplikasi. Secara keseluruhan, SIPADES memiliki manfaat dalam mendukung pengelolaan aset desa, tetapi kendala teknis pasca pembaruan versi 3.0 menyebabkan kelima indikator tersebut belum tercapai secara optimal. Oleh karena itu, diperlukan perbaikan sistem, dukungan teknis, dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia agar SIPADES dapat dimanfaatkan secara optimal.

V. REFERENSI

- [1] R. E. Indrajit, “Konsep dan Strategi Electronic Government,” *Electron. Gov.*, vol. 84, pp. 1–166, 2016, [Online]. Available: https://www.academia.edu/30100450/Electronic_Government
- [2] R. Primananda, “Analisis Pengelolaan Tanah Kas Desa Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa Di Desa Glinggangan, Kecamatan Pringkuku, Kabupaten Pacitan,” *J. Penelit. Adm. Publik*, vol. 4, no. 03, pp. 212–218, 2024.
- [3] A. Hartiningtyas and Ii. Choiriyah, Usrotin, “IMPLEMENTASI E-GOVERNMENT MELALUI APLIKASI SISTEM,” vol. 7, no. 3, pp. 1558–1573, 2024.
- [4] L. T. Pamungkas *et al.*, “Desa (Pad) Di Desa Ngebel , Kecamatan Ngebel , Kabupaten,” 2022.
- [5] L. N. Hidayah *et al.*, “Pengolahan Data Aset Desa Di Latukan Dengan,” vol. 3, no. 2, 2022.

- [6] U. A. A. Wawan, “Pengaruh Pelatihan, Kualitas Sumber Daya Manusia, dan Pengetahuan Akuntansi Terhadap Efektivitas Penerapan Aplikasi Sistem Pengelolaan Aset Desa (SIPADES) se-Kecamatan Teluk Keramat Kabupaten Sambas,” *Sebi Stud. Ekon. dan Bisnis Islam*, vol. 3, no. 1, pp. 91–98, 2021, doi: 10.37567/sebi.v3i1.789.
- [7] R. R. Nurdianti, E. E. Sasanti, and I. P. Lenap, “Analisis Implementasi Kebijakan Sistem Pengelolaan Aset Desa (SIPADES) Di Pemerintah Desa Pendem,” *J. Ris. Mhs. Akunt.*, vol. 2, no. 4, pp. 784–792, 2022, doi: 10.29303/risma.v2i4.338.
- [8] M. S. Maarif and H. Sukmana, “Village Asset Management Innovations Through Application-Based Systems,” *Indones. J. Law Econ. Rev.*, vol. 19, no. 4, pp. 1–12, Oct. 2024, doi: 10.21070/ijler.v19i4.1184.
- [9] Ediyanto and M. Indriane, “Analisis Penerapan Sistem Pengelolaan Aset Desa (SIPADES) dalam Mewujudkan Good Governance di Desa Tanjungsari Kabupaten Sumedang,” *J. Adm. Soc. Sci.*, vol. 4, no. 1, pp. 165–171, 2023, doi: 10.55606/jass.v4i1.136.
- [10] M. R. Q. and M. Raharso, “Evaluasi Kesuksesan Implementasi Sistem Pengelolaan Aset Desa (SIPADES),” *J. Manaj. Aset Infrastruktur Fasilitas*, vol. 4, no. 1, pp. 33–42, 2020, doi: 10.12962/j26151847.v4i1.6831.
- [11] S. Nur Haliza and I. Fitria Agustina, “Quality Of Population Administration Services Through Online Service (Plavon) In Realizing E-Government Kualitas Pelayanan Administrasi Kependudukan Melalui Pelayanan Via Online (Plavon) Dalam Mewujudkan E-Government,” pp. 1–11, 2024.
- [12] E. Murdiyanto, *Metode Penelitian Kualitatif (Sistematika Penelitian Kualitatif)*. 2020. [Online]. Available: http://www.academia.edu/download/35360663/METODE_PENELITIAN_KUALITAIF.docx
- [13] M. B. Miles, M. Huberman, and J. Saldaña, *Qualitative Data Analysis A Methods Sourcebook*, vol. 17. 1385.
- [14] Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Aset Desa
- [15] Dunn, W. (1999). Indikator evaluasi kebijakan. William Dunn (1999)

Conflict of Interest Statement:

The author declares that the research was conducted in the absence of any commercial or financial relationships that could be construed as a potential conflict of interest.